

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEKERJA AGEN ASURANSI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PEMALSUAN TANDA TANGAN

**Oleh
ROBBY MALAHEKSA**

Agensi Asuransi memiliki peran yang sangat vital dalam perusahaan asuransi dan merupakan ujung tombak pemasaran asuransi. Dalam praktiknya ketika proses penandatanganan formulir keikutsertaan produk asuransi terjadi pemalsuan tanda tangan yang dilakukan oleh agen asuransi, baik dengan persetujuan nasabah ataupun tidak dengan tujuan untuk mempercepat masuknya data sehingga proses pengajuan dapat lebih cepat terealisasi untuk mengejar target penjualan. Permasalahan: Bagaimanakah Penegakan Hukum terhadap Pekerja Agen Asuransi dalam perkara tindak pidana pemalsuan tanda tangan dan mengapa terdapat faktor penghambat dalam perkara tindak pidana pemalsuan tanda tangan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris, yaitu berfokus pada analisis penerapan aturan dan norma berdasarkan observasi dan eksperimen lapangan. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Analisis data dilakukan secara kualitatif tentang fenomena dalam latar alamiahnya untuk mendapatkan kesimpulan sesuai dengan pokok permasalahan.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Penegakan hukum terhadap pekerja agen asuransi dalam perkara tindak pidana pemalsuan tanda masih menggunakan Pasal 263 KUHP, tidak menggunakan asas *lex specialis derogat legi generalis* dalam hal ini Pasal 78 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dikarenakan agen asuransi bukanlah pengurus Perusahaan melainkan pihak ketiga yang mewakili perusahaan asuransi. Faktor penghambat penegakan hukum terhadap pekerja agen asuransi yaitu perundang-undangan yang mengatur segala prosedur dan tata cara tidak dipatuhi di dalam berbagai peringkat sistem peradilan pidana, sehingga asas dalam perundang-undangan tidak mencapai tujuannya secara efektif. Faktor Penegak Hukum yang tidak cermat untuk melakukan penemuan dan penerapan hukum. Saran dalam penelitian ini adalah Penegakan hukum terhadap Pekerja Agen Asuransi dalam Perkara Tindak Pidana Pemalsuan Tanda Tangan dapat diterapkan secara *lex specialis* menggunakan Undang-Undang No 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian jika yang dipalsukan adalah dokumen perusahaan asuransi dan Pemerintah harus membuat Peraturan Pelaksana atas Undang-Undang No 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

**Kata Kunci : Agen Asuransi, Penegakan Hukum, Pemalsuan Tanda Tangan,
Tindak Pidana**

ABSTRACT

LAW ENFORCEMENT TOWARD INSURANCE AGENCY WORKERS IN CRIMINAL ACTS OF SIGNATURE FORGERY

By
ROBBY MALAHEKSA

Insurance agents play a vital role in insurance companies and serve as the spearhead of insurance marketing. In practice, during the signing process of insurance product participation forms, signature forgery is often committed by insurance agents, either with or without the policyholder's consent. This is typically done to expedite data processing and accelerate the approval of applications in pursuit of sales targets. Problem Formulation: How is law enforcement applied against insurance agents in criminal cases of signature forgery, and why are there obstacles in prosecuting such cases.

This research employs a normative juridical and empirical juridical approach, focusing on the analysis of legal rules and norms based on field observations and practical experiences. The data sources used include both primary and secondary data. The data is analyzed qualitatively to interpret phenomena in their natural context and derive conclusions relevant to the core issues.

*The research findings indicate that law enforcement against insurance agents in cases of signature forgery is still based on Article 263 of the Indonesian Penal Code (KUHP), rather than the principle of *lex specialis derogat legi generali*, such as Article 78 of Law Number 40 of 2014 concerning Insurance because insurance agents are not company officials but third parties representing the company. Legal enforcement is hampered by non-compliance with established procedures and regulations across various levels of the criminal justice system, preventing the full realization of legal principles. Moreover, law enforcement officials often lack precision in legal interpretation and application. The study suggests that law enforcement against insurance agents in signature forgery should apply a *lex specialis* approach by utilizing Law No. 40 of 2014 on Insurance, particularly if the forged document is an official insurance company document and the Government must make implementing regulations for Law No. 40 of 2014 concerning insurance.*

**Kata Kunci : Criminal Act, Insurance Agents, Law Enforcement,
Signature Forgery,**